



LURAH NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/ Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
dan
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa/kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMDesa/Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Ngoro-oro dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ngoro-oro.
5. Lurah adalah Lurah Ngooro-oro Kapanewon Patuk.

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMDesa/Kalurahan Tahun 2018 -2024.
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB II
SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2025

Bab V Penutup

- (2) RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

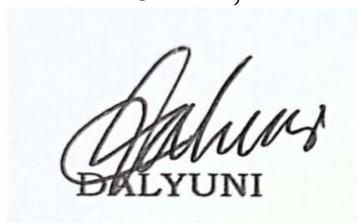
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 30 September 2024
LURAH,



Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 30 September 2024
CARIK,



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa/Kalurahan mengenai potensi Kalurahan

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan kalurahan yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan kalurahan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJMDesa/Kalurahan) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKPDesa/Kalurahan) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan.

2. Potensi Sumberdaya kalurahan

Potensi Kalurahan Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Susunan Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Kesadaran Masyarakat untuk membangun yang cukup tinggi.
- e. Jiwa kegotongroyongan yang masih ada.
- f. Adanya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- g. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- h. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- i. Banyaknya masyarakat usia produktif.

Disisi lain permasalahan yang dihadapi Kalurahan Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :

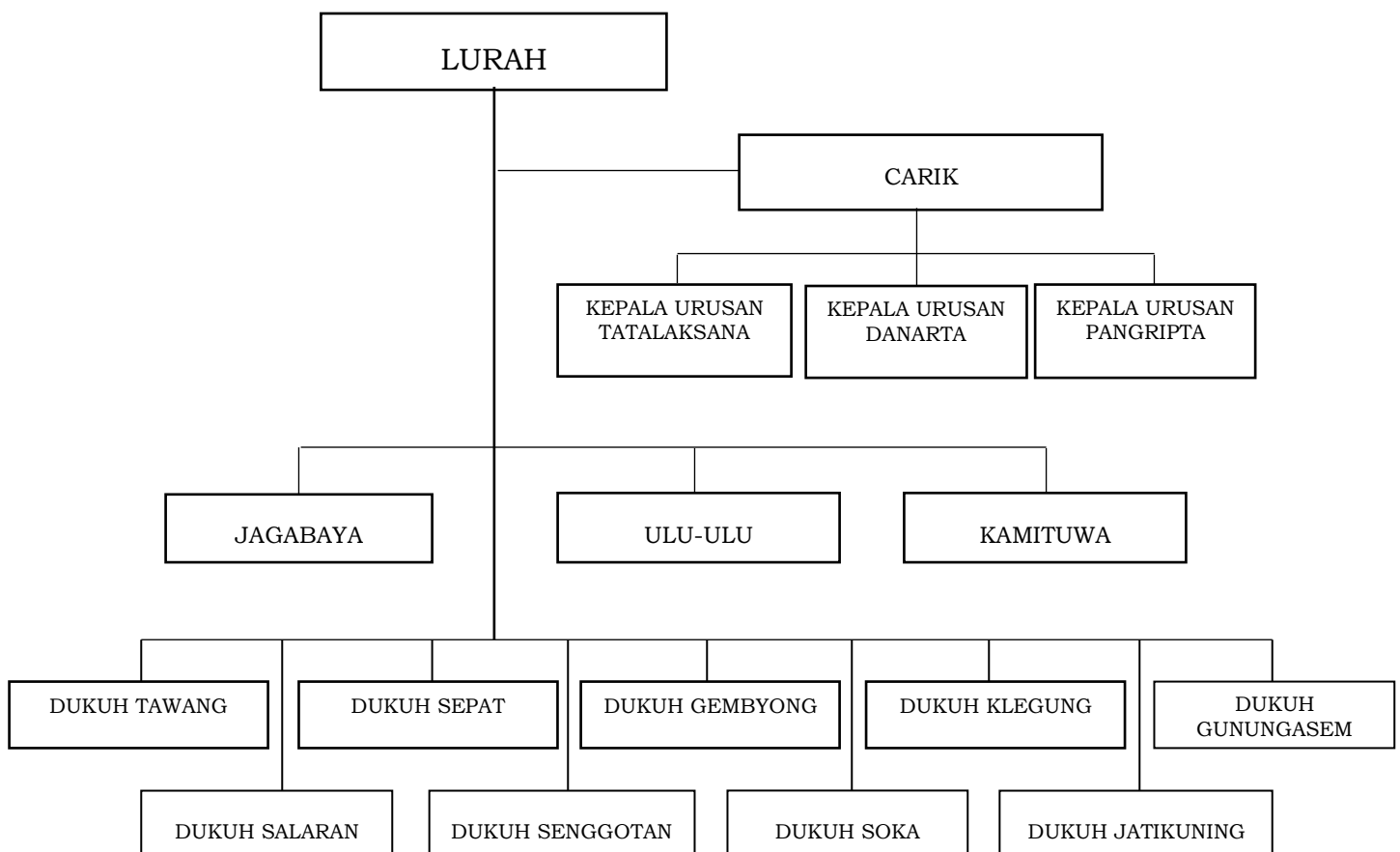
- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
- b. Masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik.
- c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.

- d. Masih ada akses jalan yang belum memadai.
 - e. Pungutan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
 - f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
 - g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
 - h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
 - i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
 - j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional.
 - k. Kondisi geografis yang berpegunungan berupa batu bertanah.
 - l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga kalurahan dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Jagabaya : 1 orang;
- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang;
- Dukuh : 9 orang;
- Staf Pamong Kalurahan : 4 orang.

Bagan Struktur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2019 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 20 Tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :



4. Pengertian RPKKalurahan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RPKKalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa/Kalurahan.

5. Fungsi RPKKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan

Tersedianya dokumen RPKKalurahan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan (APBDesa/Kalurahan) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

6. Proses penyusunan RPKKalurahan

Penyusunan Perencanaan kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan kalurahan yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat kalurahan yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun kalurahan. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

7. Keterkaitan RPKKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya :

a. RPKKalurahan dengan RPJMKalurahan

RPKKalurahan dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa/Kalurahan.

b. RPKKalurahan dengan RAPBKalurahan

RPKKalurahan sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan

c. RPKKalurahan dengan DURPKKalurahan

RPKKalurahan memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DURPKKalurahan) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon (musrenbang) kapanewon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro.

C. Tujuan

1. Tujuan

RKPKalurahan disusun dengan tujuan :

- 1) Menyiapkan daftar program kegiatan tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pemerintah kalurahan yang disepakati untuk dilaksanakan dalam RKP-Kalurahan Tahun 2025 sumber pendanaannya dari APBKalurahan.
- 2) Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2026 untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui panewu sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2027 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKPKalurahan meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

D. Visi dan Misi Kalurahan.

1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024 mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngoro-oro 2024 yang telah diperbarui, yaitu : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa/kalurahan secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan keagamaan.

7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pamong kalurahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Pamong Kalurahan dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah kalurahan dengan kelembagaan kalurahan yang ada.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksplorasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara

harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Ngoro-oro sebagai berikut:

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja pamong sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pamong Kalurahan yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi 3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kalurahan secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan dengan lembaga-lembaga yang ada di kalurahan
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat
5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masarakat
6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya 2. Mewujudkan masyarakat agamis
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Ngoro-oro berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kapanewon ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Gayamharjo/ Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
- Sebelah Barat : Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk

Ketinggian tanah di Kalurahan Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24°C sampai dengan 34°C.

Dengan demikian Kalurahan Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan tahun 2023, 2024 dan 2025 penerimaan terbesar masih dari pendapatan transfer dengan Dana Desa droping APBN masih menjadi penerimaan terbesar kemudian, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus pada klompok ini sehingga penggunaannya tidak bisa leluasa sesuai keinginan kebijakan kegiatan kalurahan, kemudian disusul pendapatan lainnya yaitu bantuan dari perusahaan yang berlokasi dikalurahan yang memberikan andil besar, kemudian yang paling sedikit adalah pendapatan asli kalurahan dikarenakan usaha kalurahan berupa BUMKal, pengutan kalurahan berupa penggunaan tanah kas kalurahan belum dikelola secara maksimal, pasar desa yang semula diharapkan memberikan PAD yang cukup banyak tetapi baru mulai di awal tahun 2024 terjadi bencana sehingga roboh dan hasil pengelolaan aset kalurahan berupa persewaan balai serta peralatan balai penggunaannya/penyewanya terbatas.

Data target penerimaan pendapatan kalurahan tahun 2023, 2024 dan proyeksi pada tahun perencanaan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PENDAPATAN KALURAHAN NGORO-ORO
DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi 2023 (n+1)	Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
4	PENDAPATAN				
4 1	Pendapatan Asli Desa	2,425,000	6,600,000	134,400,000	
4 1 1	Hasil Usaha	0	4,500,000	4,500,000	
4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	0	4,500,000	4,500,000	
4 1 2	Hasil Aset	1,575,000	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 1	Pengelolaan tanah milik Desa				

4 1 2 3	Pasar Desa				
4 1 2 7	Kios Milik Desa				
4 1 2 8	Pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa				
4 1 2 90	Obyek rekreasi yang dikelola desa;				
4 1 2 91	Balai desa	900,000	600,000	600,000	
4 1 2 92	Kantor desa;				
4 1 2 99	Lain-lain Hasil aset desa	675,000	750,000	750,000	
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
4 1 3 1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
4 1 4	Pendapatan Asli Desa Lain	850,000	750,000	128,550,000	
4 1 4 1	Hasil Pungutan Desa			127,800,000	
4 1 4 90	Penjualan hasil hutan milik desa;				
4 1 4 91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa				
4 1 4 93	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa				
4 1 4 94	Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa				
4 1 4 96	Hasil pengelolaan tanah kas desa	850,000	750,000	750,000	
4 1 4 97	Hasil pelepasan tanah desa				
4 2	Transfer	2,062,015,200	1,816,539,500	1,892,039,500	
4 2 1	Dana Desa	901,674,000	908,096,000	908,096,000	
4 2 1 1	Dana Desa	901,674,000	908,096,000	908,096,000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	75,670,100	78,072,900	78,072,900	
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	75,670,100	78,072,900	78,072,900	
4 2 2 90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
4 2 3	Alokasi Dana Desa	748,820,800	805,870,600	805,870,600	
4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	748,820,800	805,870,600	805,870,600	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	25,000,000	-	100,000,000	
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	25,000,000	-	100,000,000	
4 2 4 90	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa				
4 2 4 91	Bantuan sarana prasarana kantor desa				
4 2 4 92	Bantuan pengembangan pariwisata/budaya				

4 2 4 93	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa				
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	310,850,300	24,500,000		-
4 2 5 1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	310,850,300	24,500,000		
4 2 5 90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan				
4 2 5 91	Bantuan pelaksanaan Pilkades				
4 2 5 97	Bantuan pembangunan pasar desa				
4 2 5 99	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa				
4 3	Pendapatan Lain	33,680,589	23,400,000	23,400,000	
4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	-	
4 3 1 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa				
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
4 3 2 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga				
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	30,600,000	14,400,000	14,400,000	
4 3 3 1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	30,600,000	14,400,000	14,400,000	
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-	
4 3 4 1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga				
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	-	
4 3 5 1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-			
4 3 6	Bunga Bank	3,080,589	4,000,000	4,000,000	
4 3 6 1	Bunga Bank	3,080,589	4,000,000	4,000,000	
4 3 9	Pendapatan Lain Desa yang sah	-	5,000,000	5,000,000	
4 3 9 90	Insentif/hadiah desa lunas PBB				
4 3 9 99	Lain-lain pendapatan desa yang sah		5,000,000	5,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,098,120,789	1,846,539,500	2,049,839,500	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Memuat arah kebijakan belanja kalurahan dalam rangka membiayai prioritas dan sasaran kalurahan dalam rangka mewujudkan misi, tema, prioritas dan sasaran kalurahan tahun 2025. Belanja kalurahan yang dibiayai dari sumber Dana Desa diarahkan untuk membiayai pencapaian sasaran SDGs Desa sesuai dengan kondisi kalurahan, yang telah ditentukan penggunaannya yaitu untuk ketahanan pangan minimal 20%, Bantuan Langsung Tunai maksimal 25%, operasional pemerintah kalurahan maksimal 3%, penanganan konvergensi stunting dan kegiatan lainnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Kebijakan belanja kalurahan dalam mewujudkan sasaran pembangunan kalurahan tahun 2025 yang mendukung capaian pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Desa untuk mendanai infrastruktur kalurahan (cor rabat jalan, dan talud), pemeliharaan gedung kantor balai, rehabilitasi balai kalurahan, pemeliharaan gapura batas masuk kalurahan, pembangunan pasar dan pengembangan infrastruktur pasar kalurahan, penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan kesehatan, desa siaga/kalurahan sehat, honor-honor kader kesehatan, honor guru PAUD, pengembangan/pengelolaan pariwisata, pengelolaan sampah desa, stimulant jamban sehat, penanganan SPAL, pengelolaan informasi kalurahan (SID, KIM dll), peningkatan kapasitas lurah dan pamong kalurahan dan lain-lain.
- 2) Alokasi Dana Desa untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan prioritas dan rutin kalurahan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- 3) BKK Dana Keistimewaan untuk kegiatan dalam prioritas Reformasi Birokrasi kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat kalurahan tahun 2025.

Arah kebijakan belanja kalurahan tahun 2025 pada RKPKal menyesuaikan dengan proyeksi pelaksanaan belanja tahun sebelumnya sebagai berikut seperti pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN
REALISASI 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 dan 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2023)	Proyeksi Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
5	BELANJA				
5 1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	948,028,134	1,091,353,836	1,208,685,921	
5 11	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	850,440,335	902,594,651	899,569,651	
5 1101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,460,000	46,400,000	46,400,000	ADD, DLL, PBH
5 1102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	600,690,000	639,255,100	639,255,100	ADD, DLL, PBH
5 1103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41,354,400	44,713,014	44,707,596	ADD

5	1104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56,125,435	48,080,837	45,061,255	ADD
5	1105	Penyediaan Tunjangan BPD	53,950,000	60,547,780	60,547,780	ADD
5	1106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,050,000	6,400,000	6,400,000	ADD
5	1107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,560,500	31,042,920	31,042,920	PBH, ADD
5	1108	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25,250,000	26,155,000	26,155,000	DDS
5	12	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14,330,000	53,811,356	21,793,441	
5	1201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1,600,000	13,348,856	6,093,441	ADD, DLL
5	1202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5,000,000	14,169,500	6,500,000	PBH, DDS
5	1203	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ***)		19,643,000	4,100,000	DDS
5	1291	Pengadaan Mebel	1,530,000			PAD
5	1292	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel		1,200,000		PAD
5	1294	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2,600,000	2,450,000	2,100,000	ADD, PBH
5	1295	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3,600,000	3,000,000	3,000,000	PBH, DLL
5	13	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22,745,000	36,195,000	46,975,000	
5	1302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10,440,000	13,425,000	12,500,000	PBH, DDS, PBP
5	1303	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3,500,000	2,000,000	4,000,000	PAD
5	1390	Penyusunan monografi desa	475,000	475,000	475,000	PBH
5	1391	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	8,330,000	20,295,000	30,000,000	DDS, PBP
5	14	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55,992,770	94,171,270	107,966,270	
5	1401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	0			PBH
5	1403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2,975,000	3,425,000	3,425,000	ADD
5	1404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,100,000	4,950,000	4,950,000	PBH
5	1405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3,600,000	16,175,000	6,600,000	PBH, DDS, DLL

5	1406	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	3,885,000	2,500,000	11,000,000	PAD
5	1407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,275,000	1,050,000	1,050,000	ADD
5	1408	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20,394,000	21,250,000	23,550,000	DDS
5	1410	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD		0		PBK
5	1490	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6,358,770	5,916,270	7,616,270	PAD, PBK
5	1491	Pengisian Perangkat Desa		18,125,000	23,125,000	PBH
5	1492	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa		18,780,000	24,650,000	ADD, PBH
5	1495	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7,455,000			PBH
5	1496	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1,950,000	2,000,000	2,000,000	PBH, PBK
5	15	Sub Bidang Pertanahan	4,520,029	4,581,559	132,381,559	
5	1503	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			127,800,000	PAD
5	1590	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	4,520,029	4,581,559	4,581,559	DLL
5	2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	868,906,260	532,829,840	555,295,000	
5	21	Sub Bidang Pendidikan	33,325,000	37,105,000	50,005,000	
5	2101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24,200,000	24,200,000	37,800,000	DDS
5	2102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5,385,000	8,705,000	8,705,000	DDS
5	2108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3,740,000	4,200,000	3,500,000	DDS
5	22	Sub Bidang Kesehatan	166,815,000	179,075,000	247,170,000	
5	2202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88,460,000	97,540,000	97,540,000	DDS
5	2203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3,750,000	7,025,000	9,525,000	DDS
5	2204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11,380,000	18,415,000	78,415,000	DDS, PBP
5	2208	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		0	7,200,000	DDS
5	2209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7,640,000	2,605,000	4,100,000	DDS
5	2290	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28,290,000	28,075,000	28,075,000	DDS
5	2291	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5,015,000	6,425,000	6,425,000	DDS

5	2294	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	4,705,000	9,235,000	9,235,000	DDS
5	2296	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB		3,100,000		DDS
5	2298	Insentif kader kesehatan/KB	17,575,000	6,655,000	6,655,000	DDS
5	23	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	535,372,300	167,808,000	137,476,000	
5	2309	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1,576,000	1,476,000	1,476,000	DDS
5	2310	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95,691,000	166,332,000	37,000,000	DDS, PBK
5	2311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	185,850,000			PBK
5	2312	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80,000,000			PBK
5	2314	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong, slokan dll)	132,255,300		99,000,000	DDS, PBK
5	2315	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	40,000,000			PBK, PBP
5	24	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	94,022,000	123,916,840	102,089,000	
5	2411	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	14,473,000			DDS
5	2412	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)		17,830,000		DDS
5	2415	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		12,997,840		PBK
5	2416	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	18,830,000	32,320,000	32,320,000	DDS
5	2491	Pemberian stimulan jamban sehat	60,719,000	60,769,000	60,769,000	DDS
5	2492	Pengelolaan sampah desa/permukiman			9,000,000	DDS
5	26	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23,071,960	9,025,000	9,025,000	
5	2602	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9,400,000	2,250,000	2,250,000	DDS
5	2603	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	13,671,960	6,775,000	6,775,000	DDS
5	28	Sub Bidang Pariwisata	16,300,000	15,900,000	9,530,000	
5	2803	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9,450,000	11,350,000	4,980,000	DDS
	2890	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6,850,000	4,550,000	4,550,000	DDS
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	65,088,197	28,316,425	18,716,425	

31	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18,063,400	8,121,425	8,121,425	
3102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10,088,400	3,650,000	3,150,000	PBH
3190	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4,320,000	4,471,425	2,500,000	DLL, PBH
3192	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	3,655,000		2,471,425	PBH
3193	Pembinaan Jaga Warga				PBH
32	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17,755,000	0	0	
3201	Pembinaan group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,975,000			PAD
3202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	3,350,000			DLL, PBH
3203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9,430,000			DLL, PBH
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13,839,000	1,550,000	1,550,000	
3301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot	4,050,000			PBH
3303	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5,750,000			PBH
3304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2,339,000			PBH
3393	Operasional Karang Taruna	1,700,000	1,550,000	1,550,000	ADD
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15,430,797	18,645,000	9,045,000	
3491	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3,725,000	14,765,000	5,165,000	DDS
3492	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6,905,797			DLL
3495	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1,460,000	1,170,000	1,170,000	ADD
3496	Operasional PKK	3,340,000	2,710,000	2,710,000	ADD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	291,977,636	281,965,046	307,940,000	
41	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	27,328,500	32,038,500	27,938,500	
4105	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	23,788,500	24,563,500	24,563,500	DDS
4191	Pembinaan kelompok perikanan darat	3,540,000	3,375,000	3,375,000	DDS
4194	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif		4,100,000		DDS
42	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	153,018,000	172,786,546	155,101,500	

4203	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	146,650,000	169,685,000	147,900,000	DDS
4291	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3,268,000		4,100,000	DDS
4292	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3,100,000	3,101,546	3,101,500	DDS
43	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	0	4,200,000	
4301	Peningkatan kapasitas kepala Desa			700,000	DDS
4302	Peningkatan kapasitas perangkat Desa			3,500,000	DDS
44	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	3,425,000	0	
4496	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja		3,425,000		DDS
45	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3,600,000	3,200,000	3,200,000	
4590	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3,600,000	3,200,000	3,200,000	DDS
46	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
4602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	DDS
47	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106,031,136	68,515,000	115,500,000	
4702	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	104,031,136	64,515,000	111,500,000	DDS
4704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		4,000,000	4,000,000	DDS
4792	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	2,000,000			DDS
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	108,600,000	84,742,000	69,111,546	
51	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15,000,000	30,742,000	29,511,546	
5101	Kegiatan Penanggulangan Bencana	15,000,000	30,742,000	29,511,546	DDS
53	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93,600,000	54,000,000	39,600,000	
5301	Penanganan Keadaan Mendesak	93,600,000	54,000,000	39,600,000	DDS
	JUMLAH BELANJA	2,282,600,227	2,019,207,147	2,159,748,892	

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pembiayaan tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan kalurahan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n+1, n dan n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN KALURAHAN
REALISASI TAHUN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 & 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2023)	Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	227,386,427	173,141,047	159,909,392	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	227,386,427	173,141,047	159,909,392	
6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	227,386,427	173,141,047	159,909,392	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan				
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	-	
6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	
6 1 9 90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000	-	50,000,000	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan				
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	50,000,000	-	50,000,000	
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa	50,000,000	-	50,000,000	
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	
6 2 9 90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya				

BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RPKKALURAHAN TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih banyak program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh kalurahan;
2. Pendapatan Asli Kalurahan yang masih sangat rendah;
3. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan juga memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBKalurahan tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan dan evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan, yang disajikan dalam Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKalurahan DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.
3. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas kalurahan belum semuanya bisa terdandai karena perubahan kebijakan pemerintah dengan focus kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan hewani-nabati dan kegiatan penanganan stunting.
4. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

Prioritas program kegiatan skala kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan melalui dana APBKalurahan Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Prioritas program kegiatan skala Kalurahan Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.1.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2026, dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2027 disajikan dalam tabel 4.2.

BAB V PENUTUP

RKPKalurahan merupakan pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam peyusunan APBKalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan.

Penyusunan RKPKalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur/elemen masyarakat Kalurahan diantaranya: Pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL, LKK, KPMK, Tokoh masyarakat, pemuka pendidikan, Forum Anak, TKPK Kalurahan, BUMKal, pengelola Pariwisata, kelompok perempuan, kelompok rentan (difabel, miskin, lansia) dll, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari musyawarah kalurahan dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan sampai kepada di peroleh rancangan Akhir RKPKalurahan.

Dokumen RKPKalurahan diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yag akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 30 September 2024
Lurah,



1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Tersedianya pengganti tanah Desa	Kalurahan	1 Paket	0										
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			100%	96%	0	0	508,795,550	0	25,000,000	296,319,460	0	0	0	
A.	Sub Bidang Pendidikan					0	0	32,472,000	0	0	0	0	0	0	
1	Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA /TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor guru PAUD dan TK	PAUD ABA & PAUD Melati	96 OB	96 OB			24,076,000							
2	Dukungan Penyelenggaraan Paud (APE,Sarana Paud dst)	Sarana pembelajaran PAUD	PAUD ABA & PAUD Melati	2 Paket	2 Paket			5,385,000							
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terkelolanya perpustakaan Onto	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			3,011,000							
B.	Sub Bidang Kesehatan					0	0	158,827,000	0	0	0	0	0	0	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Terpenuhinya kebutuhan Yandu Balita, Lansia, dan Kelas Bumil	9 Padukuhan	3 Paket	3 Paket			86,500,000							
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Terlaksananya penyuluhan nikah dini untuk masy	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			3,575,000							
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan dan operasional kalurahan sehat	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			6,397,500							
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD **	Tersedianya prasarana posyandu	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			7,640,000							
5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terselenggaranya operasional/honor kader posbindu	9 Posbindu	552 OB	552 OB			28,205,500							
6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germa)	Terciptanya adat kebiasaan baru menghadapi wabah	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			4,865,000							
7	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita /Siswa Paud	Siswa PAUD yang lebih sehat	Salaran, Jatikuning	1 Paket	1 Paket			4,170,000							
8	Insentif Kader Kesehatan / KB	Terbayarnya insentif kader kesehatan	Kalurahan	492 OB	492 OB			17,474,000							
C.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					0	0	197,973,790	0	25,000,000	296,319,460	0	0	0	
1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/ Batas Desa	Terpeliharanya Gapura Batas Kalurahan	Jatikuning	1 Unit	1 Unit			1,563,000							
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **).	Terbangunnya rabat jalan	Soka	1 Paket	1 Paket			94,778,000							

1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Terbinanya klompok kesenian	Kalurahan	1 Paket	0										
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Terlaksananya pengiriman kontingen	Kalurahan	1 Paket	0										
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	Kalurahan	2 Paket	1 Paket									7,590,000	
C.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					0	0	0	1,600,000	0	0	6,319,000	0	0	
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota	Terlaksananya pengiriman kontingen	Kalurahan	1 Paket	1 Paket							3,980,000			
2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Terlaksananya lomba olah raga	Kalurahan	1 Paket	0										
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Sarana olah raga yang baik	Kalurahan	1 Paket	1 Paket							2,339,000			
4	Operasional Karang Taruna	Lancarnya beban oprasional karang taruna	Kalurahan	1 Paket	1 Paket				1,600,000						
D.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					0	0	3,600,000	2,485,000	0	0	0	0	5,436,000	
1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Terbayarnya honor KPM	Kalurahan	24 OB	24 OB			3,600,000							
2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kemiskinan di Desa teratasi	Kalurahan	1 Paket	1 Paket									5,436,000	
3	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Lancarnya beban oprasional LPMD	Kalurahan	1 Paket	1 Paket				80,000						
4	Operasional PKK	Lancarnya beban oprasional PKK	Kalurahan	1 Paket	1 Paket				2,405,000						
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			100%	84%	0	0	244,785,000	0	0	0	0	0	0	0
A.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					0	0	26,494,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Bantuan Perikanan (Bibit,Pakan dll)	Terlaksananya bantuan perikanan (kolam, bibit ikan dan pakan)	9 Padukuhan	1 Paket	1 Paket			23,254,000							
2	Pembinaan kelompok perikanan darat	Terlaksananya pembinaan kelompok perikanan	Kalurahan	1	1			3,240,000							
B.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					0	0	110,988,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Terlaksananya pemberian bibit tanaman bagi masyarakat	9 Padukuhan	1 Paket	1 Paket			104,820,000							
2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Pengolahan hasil pertanian	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			3,168,000							

3	Pembinaan/Pemberdayaan klompok tani/Gapoktan	Klompok tani yang lebih maju	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			3,000,000							
C.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pengiriman Kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/ Daerah/Nasional	Terlaksananya kegiatan promosi UMKM	Kapanewon / Kabupaten	1 Paket	1 Paket										
D.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Pelatihan Yang dilaksanakan Oleh Pemdes)	Pengelola BUMDesa yang profesional	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			2,000,000							
E.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					0	0	105,303,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Terbangunnya pasar kalurahan	Tawang	1 Paket	1 Paket			103,303,000							
2	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Pasar kalurahan yang lebih baik	Kalurahan	1 Paket	1 Paket			2,000,000							
V.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			100%	99%	0	0	107,845,000	0	0	0	0	0	0	0
A.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					0	0	14,245,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulangnya kejadian bencana	Klegung	1 Paket	1 Paket			14,245,000							
B.	Sub Bidang Keadaan Mendesak					0	0	93,600,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	Pemberian BLT-DD	Kalurahan	312 OB	312 OB			93,600,000							
	JUMLAH BELANJA			100%	86%	0	10,590,500	895,112,050	750,087,684	25,000,000	296,319,460	51,747,600	36,032,875	37,476,000	
VI.	PEMBIAYAAN :														
A.	Pengeluaran Pembiayaan							50,000,000							
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan modal ke bumkalma	Bumkalma Murakabi	1 Tahun	1 Tahun			50,000,000							

II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				34%	89%		0	504,127,000	0	0	37,497,840	0	0	0
A.	Sub Bidang Pendidikan				60%	100%		0	36,405,000	0	0	0	0	0	0
1	Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA /TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor guru PAUD	PAUD ABA & PAUD Melati	96 OB	50%	100%			24,200,000						
2	Dukungan Penyelenggaraan Paud (APE,Sarana Paud dst)	Sarana pembelajaran PAUD	PAUD ABA & PAUD Melati	2 Paket	100%	100%			8,705,000						
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terkelolanya perpustakaan Onto	Kalurahan	1 Paket	31%	99%			3,500,000						
B.	Sub Bidang Kesehatan				35%	98%		0	185,770,000	0	0	0	0	0	0
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Terpenuhinya kebutuhan Yandu Balita, Lansia, dan Kelas Bumil	9 Padukuhan	3 Paket	47%	99%			97,540,000						
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Terlaksananya penyuluhan nikah dini untuk masy	Kalurahan	2 Paket	0%	99%			7,025,000						
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan dan operasional kalurahan sehat	Kalurahan	1 Paket	0%	94%			18,415,000						
4	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD **	Tersedianya prasarana posyandu	Kalurahan	1 Paket	0%	99%			9,300,000						
5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terselenggaranya operasional/ honor kader posbindu	9 Padukuhan	1 Paket	46%	100%			28,075,000						
6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germa)	Terciptanya adat kebiasaan baru menghadapi wabah	Kalurahan	1 Paket	59%	96%			6,425,000						
7	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita /Siswa Paud	Siswa PAUD yang lebih sehat	Salaran, Jatikuning	1 Paket	0%	100%			9,235,000						
8	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	Terbinanya kampung KB	Kalurahan	1 Paket	0%	99%			3,100,000						
9	Insentif Kader Kesehatan / KB	Terbayarnya insentif kader kesehatan	9 Padukuhan	108 OB	49%	100%			6,655,000						
C.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				29%	90%		0	254,227,000	0	0	37,497,840	0	0	0
1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/ Batas Desa	Terpeliharanya Gapura Batas Kalurahan	Jatikuning	1 Unit	0%	50%			1,476,000						
2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **).	Terbangunnya rabat jalan	Tawang, Senggotan	1 Paket	0%	99%			141,832,000			24,500,000			
3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga.	Lancarnya saluran air ke rumah tangga	Soka	1 Paket	0%	99%			17,830,000						
4	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkata Fasilitas Pengelolaan sampah.	Terbangunnya fasilitas pengelolaan sampah	Jatikuning	1 Paket	80%	99%						12,997,840			

5	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistim Pembuangan Air limbah.	Terbangunnya SPAL	Kalurahan	32 KK	74%	96%			32,320,000						
6	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	Tersedianya jamban sehat bagi RTM	Kalurahan	11 KK	84%	94%			60,769,000						
D.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				6%	59%		0	9,025,000	0	0	0	0	0	0
1	Penyelenggaraan Inormasi Publik Desa (Poster,Baliho dll)	Tersedianya informasi publik	Kalurahan	1 Paket	25%	68%			2,250,000						
2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal desa	Tersedianya/ terpeliharanya alat/ mesin jaringan TIK	Kalurahan	1 Paket	0%	50%			6,775,000						
E.	Sub Bidang Pariwisata					96%		0	18,700,000	0	0	0	0	0	0
1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Terkelolanya pariwisata di desa	Kalurahan	1 Paket	68%	98%			14,150,000						
2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Desa wisata yang maju	Kalurahan	1 Paket	0%	94%			4,550,000						
III.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				43%	75%		0	14,765,000	5,430,000	0	0	8,121,425	0	0
A.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				4%	99%		0	0	0	0	0	8,121,425	0	0
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Satuan linmas yang lebih baik	Kalurahan	1 Paket	8%	98%							3,650,000		
2	Pembinncaanaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Lembaga Kaltana yang terlatih	Kalurahan	1 Paket	0%	100%							4,471,425		
B.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				0%	50%		0	0	1,550,000	0	0	0	0	0
1	Operasional Karang Taruna	Lancarnya beban oprasional karang taruna	Kalurahan	1 Paket	0%	50%				1,550,000					
C.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				64%	75%		0	14,765,000	3,880,000	0	0	0	0	0
1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Terbayarnya honor KPM	Kalurahan	1 Paket	81%	96%			14,765,000						
2	Operasional LPMD dan/atau LPMP	Lancarnya beban oprasional LPMK	Kalurahan	1 Paket	0%	50%				1,170,000					
3	Operasional PKK	Lancarnya beban oprasional PKK	Kalurahan	1 Paket	0%	80%				2,710,000					
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				0%	89%		0	259,180,046	0	0	0	0	0	0
A.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				0%	100%		0	32,038,500	0	0	0	0	0	0
1	Bantuan Perikanan (Bibit,Pakan dll)	Terlaksananya bantuan perikanan (kolam, bibit ikan dan pakan)	9 Padukuhan	1 Paket	0%	99%			24,563,500						
2	Pembinaan kelompok perikanan darat	Terlaksananya pembinaan kelompok perikanan	Kalurahan	1 Paket	0%	100%			3,375,000						
3	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ikan Alternati	Tersedianya pakan ikan alternatif	Kalurahan	1 Paket	0%	100%			4,100,000						
B.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				0%	99%		0	150,001,546	0	0	0	0	0	0

1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Terlaksananya pemberian bibit tanaman bagi masyarakat	Kalurahan	1 Paket	0%	98%			146,900,000							
2	Pembinaan/Pemberdayaan klompok tani/Gapoktan	Klompok tani yang lebih maju	Kalurahan	1 Paket	0%	99%			3,101,546							
C.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				0%	99%		0	3,425,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksi	Kalurahan	1 Paket	0%	99%			3,425,000							
D.	Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM)				29%	50%		0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Pengiriman Kelompok dalam Promosi/Pameran Produk Usaha Masyarakat Di Tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Terkirimnya kelompok umkm dlm pameran di tkt kapanewon/kabupaten	Kpanewon/Kabupaten	1 Paket	29%	50%			3,200,000							
E.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				0%	94%		0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Des (Pelatihan Yang dilaksanakan Oleh Pemdes)	Pengelolaan BUMDes lebih profesional	Kalurahan	1 Paket	0%	94%			2,000,000							
F.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian				0%	93%		0	68,515,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Pembangunan/Rehap Pasar Desa/Kios Milik Desa	Terbangunnya kantor pasar	Tawang	1 Unit	0%	99%			64,515,000							
2	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Klompok usaha yang mampu bersaing	Kalurahan	1 Paket	0%	86%			4,000,000							
V.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				32%	100%		0	84,742,000	0	0	0	0	0	0	0
A.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				0%	99%		0	30,742,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulangi nya kejadian bencana	Kalurahan	1 Paket	0%	99%			30,742,000							
B.	Sub Bidang Keadaan Mendesak				50%	100%		0	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Tersalurnya BLT-DD	Kalurahan	180 OB	50%	100%			54,000,000							
JUMLAH BELANJA					35%	85%		11,616,270	1,004,316,546	821,814,151	0	112,996,340	69,426,925	25,650,000	40,380,415	

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2025

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI

: NGORO-ORO
: PATUK
: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Data Exciting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Sasaran SDGs	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		902,594,651	899,569,651					899,569,651					
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan	46,400,000	46,400,000		13 OB	Lurah	12 bulan	46,400,000	ADD, PBH	√			Januari - Desember
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan	639,255,100	639,255,100		260 OB	Pamong dan Staf Pamong Kalurahan	12 bulan	639,255,100	ADD, PBH, DLL	√			Januari - Desember
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan	44,713,014	44,707,596	3 Desa Sehat dan Sejahtera	300 OP	Lurah, Pamong dan Staf Pamong	12 bulan	44,707,596	ADD	√			Januari - Desember
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan	48,080,837	45,061,255	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	45,061,255	ADD	√			Januari - Desember
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan	60,547,780	60,547,780	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	117 OB	Anggota BPK	12 bulan	60,547,780	ADD	√			Januari - Desember

	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan	6,400,000	6,400,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Anggota BPK	12 bulan	6,400,000	ADD	√			Januari - Desember
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	31,042,920	31,042,920	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	612 OB	Ketua RT/RW	12 bulan	31,042,920	PBH, ADD	√			Januari - Desember
	8	Pengadaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan	26,155,000	26,155,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	3 paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	26,155,000	DDS	√			Januari - Desember
	2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		53,811,356	21,793,441					21,793,441					
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	13,348,856	6,093,441	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	6,093,441	DLL	√			Juni
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan	14,169,500	6,500,000	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	6,500,000	DDS	√			Juli
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan	19,643,000	4,100,000	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	4,100,000	DDS	√			Juli
	4	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Kalurahan	1,200,000		9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan		PAD	√			Januari - Desember
	5	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan	2,450,000	2,100,000	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,100,000	PBH	√			Januari - Desember
	6	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan	3,000,000	3,000,000	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	3,000,000	DLL	√			Januari - Desember
	3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		36,195,000	46,975,000					46,975,000					
	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan	13,425,000	12,500,000	1 Desa tanpa Kemiskinan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	12,500,000	DDS, PBP	√			Juli, Desember
	2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalurahan	2,000,000	4,000,000	17 Kemitraan untuk pembangunan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	4,000,000	PAD	√			Pebruari

					n desa									
	3	Penyusunan monografi desa	Kalurahan	475,000	475,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	475,000	PBH	√		Juli, Desember
	4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan	20,295,000	30,000,000	1 Desa tanpa Kemiskinan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	30,000,000	DDS, PBP	√		Januari/Pebruari
	4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		94,171,270	107,966,270					107,966,270				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan	3,425,000	3,425,000	10 Desa tanpa kesenjangan	1 Ls	Pemkal dan Bamuskal	3 bulan	3,425,000	ADD	√		Juli, September, Desember
	2	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	4,950,000	4,950,000	10 Desa tanpa kesenjangan	1 Ls	Pemkal dan Bamuskal	2 bulan	4,950,000	PBH	√		Pebruari, November
	3	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan	16,175,000	6,600,000	10 Desa tanpa kesenjangan	24 OB	Petuga Aset	2 bulan	6,600,000	DDS, DDL	√		Oktober, November
	4	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	2,500,000	11,000,000	10 Desa tanpa kesenjangan	1 Ls	Pemkal dan Bamuskal	3 bulan	11,000,000	PBP	√		Januari, Agustus, Desember
	5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	1,050,000	1,050,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Pemkal	2 bulan	1,050,000	ADD	√		Januari - Desember
	6	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan	21,250,000	23,550,000	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	3 bulan	23,550,000	DDS	√		Juni, Agustus, Oktober
	7	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan	5,916,270	7,616,270	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Pemkal	12 bulan	7,616,270	PAD	√		Januari - Desember
	8	Pengisian perangkat desa/Staf Perangkat Desa	Kalurahan	18,125,000	23,125,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	3 orang	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	23,125,000	PBH	√		Januari - Desember
	9	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kalurahan	18,780,000	24,650,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	2 orang	Pamong Kalurahan	1 bulan	24,650,000	PBH	√		April
	10	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan	2,000,000	2,000,000	10 Desa tanpa kesenjangan	2 kali	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	2,000,000	PBK	√		Juli, November
	5	Sub Bidang Pertanahan		4,581,559	132,381,559					132,381,559				

	1	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kalurahan	0	127,800,000	10 Desa tanpa kesenjangan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	127,800,000	PAD			√	Januari - Desember
	2	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Kalurahan	4,581,559	4,581,559	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	1 paket	Pamong Kalurahan	12 bulan	4,581,559	DLL			√	Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 1										1,208,685,921					
2	II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
	1	Sub Bidang Pendidikan			50,005,000					50,005,000					
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	37,105,000	24,200,000	37,800,000	4 Pendidikan desa berkualitas	264 (96) OB	Guru PAUD/TK, Ustadz/guru TPA	12 bulan	37,800,000	DDS	√		Januari - Desember
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kalurahan	8,705,000	8,705,000	4 Pendidikan desa berkualitas	1 Ls	Murid dan Guru PAUD/TK	1 bulan	8,705,000	DDS	√		Mei	
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	4,200,000	3,500,000	4 Pendidikan desa berkualitas	24 OB	Petugas Perpustakaan	12 bulan	3,500,000	DDS	√		Januari - Desember	
	2	Sub Bidang Kesehatan		179,075,000	247,170,000					247,170,000					
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Kalurahan	97,540,000	97,540,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1104 OB	Kader, Bumil dan Balita	12 bulan	97,540,000	DDS	√		Januari - Desember	
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kalurahan	7,025,000	9,525,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Ls	KPM dan Masyarakat	12 bulan	9,525,000	DDS	√		Januari - Desember	
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	18,415,000	78,415,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	78,415,000	DDS, PBP	√		Januari - Desember	
	4	Pemeliharaan Srana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Kalurahan	-	7,200,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	7,200,000	DDS	√		Maret, Mei, September	
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kalurahan	2,605,000	4,100,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	4,100,000	DDS	√		Maret, Mei, September	
	6	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan	28,075,000	28,075,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	562 OB	Kader Posbindu	12 bulan	28,075,000	DDS	√		Januari - Desember	
	7	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan	6,425,000	6,425,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	6,425,000	DDS	√		Januari - Desember	
	8	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan	9,235,000	9,235,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	175 Anak	Anak Balita/PAUD	3 bulan	9,235,000	DDS	√		April, Agustus, Desember	
	9	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kalurahan	3,100,000		3 Desa Sehat dan Sejahtera	175 Anak	Anak Balita/PAUD	3 bulan		DDS	√		April, Agustus, Desember	

10	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan	6,655,000	6,655,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	492 OB	Kader kesehatan	12 bulan	6,655,000	DDS	√			Januari - Desember
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		167,808,000	137,476,000					137,476,000					
1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Jatikuning	1,476,000	1,476,000	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	1,476,000	DDS	√			Juli - Agustus
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Perkerasan Jalan Desa	Gunungasem	166,332,000	37,000,000	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	p 80 m	Masyarakat	3 bulan	37,000,000	DDS	√			Juni - Juli
3	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Gembyong		99,000,000	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	p 68 m t 2 m	Masyarakat	2 bulan	99,000,000	DDS	√			Agustus - September
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		123,916,840	102,089,000					102,089,000					
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kalurahan	17,830,000		6 Desa layak air bersih dan sanitasi	1 Ls	Klompok Masyarakat	2 bulan		DDS	√			Juni - Juli
2	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Jatikuning	12,997,840		7 Desa berenergi bersih dan terbarukan	1 Ls	Bank Sampah	3 bulan		DDS	√			Agustus - Oktober
3	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kalurahan	32,320,000	32,320,000	6 Desa layak air bersih dan sanitasi	36 RTM	RTM/ Masyarakat	3 bulan	32,320,000	DDS	√			Agustus - Oktober
4	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan	60,769,000	60,769,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	8 RTM	RTM/ Masyarakat	3 bulan	60,769,000	DDS	√			Juli - September
5	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Kalurahan		9,000,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Paket	Masyarakat	3 bulan	9,000,000	DDS	√			Juli - September
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		9,025,000	9,025,000					9,025,000					
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan	2,250,000	2,250,000	10 Desa tanpa kesenjangan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	2,250,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan	6,775,000	6,775,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	6,775,000	DDS	√			Januari - Desember
6	Sub Bidang Pariwisata		15,900,000	9,530,000					9,530,000					
1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan	11,350,000	4,980,000	8 Pertumbuhan ekonomi desa	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	3 bulan	4,980,000	DDS	√			Mei -Juli

						merata									
	2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan	4,550,000	4,550,000	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	3 bulan	4,550,000	DDS	√			September - November
									Jumlah Per Bidang 2	555,295,000					
3	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		8,594,825	8,121,425					8,121,425					
	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan	4,123,400	3,150,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Linmas kalurahan	4 bulan	3,150,000	PBH	√			Maret, Juni, September, Desember
	2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan	4,471,425	2,500,000	13 Desa tanggap perubahan iklim	1 Ls	FPRB, KSB dan Sibat	2 bulan	2,500,000	PBH	√			Juli - Agustus
	3	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan		2,471,425	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Jaga warga	2 bulan	2,471,425	PBH	√			Juli - Agustus
	2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		1,550,000	1,550,000					1,550,000					
	1	Operasional Karang Taruna	Kalurahan	1,550,000	1,550,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Karangtaruna	12 bulan	1,550,000	ADD	√			12 bulan
	3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		18,645,000	9,045,000					9,045,000					
	1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan	14,765,000	5,165,000	3 Desa Sehat dan Sejahtera	24 OB	KPM	12 bulan	5,165,000	DDS	√			Januari - Desember
	2	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan	1,170,000	1,170,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	LPMP dan LPMK	12 bulan	1,170,000	ADD	√			Januari - Desember
	3	Operasional PKK	Kalurahan	2,710,000	2,710,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	PKK	12 bulan	2,710,000	ADD	√			Januari - Desember
									Jumlah Per Bidang 3	18,716,425					
4	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		32,038,500	27,938,500					27,938,500					
	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kalurahan	24,563,500	24,563,500	12 Konsumsi dan produksi desa sadar	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	24,563,500	DDS	√			Maret - April

						lingkungan									
	2	Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan	3,375,000	3,375,000	4 Pendidikan desa berkualitas	1 Ls	Klompok perikanan	1 bulan	3,375,000	DDS	√			Mei
	3	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	Kalurahan	4,100,000		4 Pendidikan desa berkualitas	1 Ls	Klompok perikanan	1 bulan		DDS	√			Mei
	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		172,786,546	155,101,500					155,101,500					
	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan	169,685,000	147,900,000	2 Desa tanpa Kelaparan	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	147,900,000	DDS	√			Maret - April
	2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan		4,100,000	2 Desa tanpa Kelaparan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	4,100,000	DDS	√			Juni
	3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan	3,101,546	3,101,500	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Anggota Kelompok Tani / Gapoktan	1 bulan	3,101,500	DDS	√			September
	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		0	4,200,000					4,200,000					
	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kalurahan	0	700,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Lurah	1 kali	700,000	DDS	√			Agustus, Oktober
	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kalurahan	0	3,500,000	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	1 Ls	Pamong & Staf	1 kali	3,500,000	DDS	√			Agustus, Oktober
	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		3,425,000	0					0					
	1	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan	3,425,000	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera	1 Ls	Remaja	2 bulan	0	DDS	√			Agustus, Oktober
	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		3,200,000	3,200,000					3,200,000					
	1	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kalurahan	3,200,000	3,200,000	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	1 Ls	Kelompok UMKM	2 bulan	3,200,000	DDS	√			Agustus, Oktober
	6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		2,000,000	2,000,000					2,000,000					
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan	2,000,000	2,000,000	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	2 kali	Pengurus BUMKal	2 bulan	2,000,000	DDS	√			Mei, September
	6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		68,515,000	115,500,000					115,500,000					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan	64,515,000	111,500,000	8 Pertumbuhan	1 Unit	Pemkal dan Masyarakat	3 bulan	111,500,000	DDS	√			September - November

						ekonomi desa merata									
	2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kalurahan	4,000,000	4,000,000	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	1 Ls	Pelatihan kelompok usaha	1 bulan	4,000,000	DDS	√			November
Jumlah Per Bidang 4										307,940,000					
5	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		30,742,000	29,511,546					29,511,546					
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	30,742,000	29,511,546	13 Desa tanggap perubahan iklim	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	29,511,546	DDS	√			Januari - Desember
	2	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa		54,000,000	39,600,000					39,600,000					
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	54,000,000	39,600,000	1 Desa tanpa Kemiskinan	132 OB	Masyarakat	12 bulan	39,600,000	DDS	√			Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 5										69,111,546					
6	VI	PEMBIAYAAN													
	1	Pengeluaran Pembiayaan		0	50,000,000					50,000,000					
	1	Penyertaan Modal Desa	Kalurahan	0	50,000,000	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	1 Ls	BUMKALMA Murakabi	12 bulan	50,000,000	DDS	√			Januari - Desember
JUMLAH TOTAL										2,209,748,892					

Tabel 4.2
 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN) TAHUN 2026
 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2027

KALURAHAN : NGORO-ORO
 KAPANEWON : PATUK
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Mendukung Sasaran SDGs	Perkiraan Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kalurahan	1 Paket (10 orang)	Penduduk wajib KTP belum pernah direkam datanya, telah berusia 17 Tahun, manula dan penyandang Disabilitas	10 Desa tanpa kesenjangan	4,200,000	APBD KAB (PIS)
2	Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan	Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan	1 Angkatan	Masyarakat yang berusia sekolah (SMP, SMA)	3 Desa Sehat dan Sejahtera	9,965,000	APBD KAB (PIS)
3	Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan	Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan	1 Angkatan	Anggota Satlinmas yang handal dan profesional	16 Desa Damai Berkeadilan	7,450,000	APBD KAB (PIS)
4	Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Mandiri	Kalurahan	1 Angkatan	Pokdakan dapat membuat pakan ikan secara mandiri	2 Desa tanpakelaparan	3,790,000	APBD KAB (PIS)
5	Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan Sosial Penampungan Air Hujan (PAH)	Kalurahan	15 RuTa	RTM terdampak kekeringan tidak punya jaringan SPAM akan mempunyai PAH	6 Desa layak air bersih dan sanitasi	120,000,000	APBD KAB (PIS)
6	Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi Rumah Tangga miskin	Kalurahan	5 RuTa	RTM belum memiliki jamban sehat dan belum memiliki saluran pembuangan limbah	6 Desa layak air bersih dan sanitasi	35,000,000	APBD KAB (PIS)

7	Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 meter	Jatikuning	0,06 KM (60 meter)	Masyarakat pengguna jalan	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	250,000,000	APBD KAB (PIS)
8	Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Pengadaan dan pemasangan warning light	Tawang	2 Unit	Masyarakat pengguna jalan	13 Desa tanggap perubahan iklim	100,000,000	APBD KAB (PIS)
9	Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan	Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan	1 Angkatan	Tokoh masyarakat, Perangkat Kalurahan, PKK, Linmas, Tokoh Agama dan Karang Taruna	4 Pendidikan desa berkualitas	7,110,000	APBD KAB (PIWK)
10	Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahan	1 Kalurahan	Pamong kalurahan, kader, tokoh masyarakat, forum anak, dan guru PAUD	16 Desa Damai Berkeadilan	6,345,000	APBD KAB (PIWK)
11	Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan	Workshop dan pendampingan ibu hamil dan nifas dengan risiko tinggi	Kalurahan	1 Angkatan	Kader kesehatan	3 Desa Sehat dan Sejahtera	19,010,000	APBD KAB (PIWK)
12	Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Desa Wisata	Kalurahan	1 Angkatan	Pengelola desa wisata dan pokdarwis	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	21,815,000	APBD KAB (PIWK)
13	Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pengelasan	Kalurahan	1 Angkatan	Masyarakat	4 Pendidikan desa berkualitas	59,815,000	APBD KAB (PIWK)
14	Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Service Sepeda Motor	Kalurahan	1 Angkatan	Masyarakat	4 Pendidikan desa berkualitas	49,515,000	APBD KAB (PIWK)
15	Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Pembangunan Sumur	Klegung, Gembyong	2 Titik	Masyarakat	6 Desa layak air bersih dan sanitasi	427,460,000	APBD KAB (PIWK)
16	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Padat karya Jogja istimewa	Klegung	1 Paket	Masyarakat	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	175,000,000	DAIS
17	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Rehabilitasi balai padukuhan	Salaran, Tawang, Senggotan	3 Paket	Masyarakat	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	225,000,000	DAIS

18	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Pembangunan Omah jaga warga	Sepat, Tawang	2 Paket	Masyarakat	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	100,000,000	DAIS
19	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Desa Preneur	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat dan UMKM	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata	400,000,000	DAIS
JUMLAH							2,021,475,000	